

Perkembangan dunia ternyata tidak bisa dilepaskan dari konflik, baik konflik domestik ataupun konflik antar negara. Konflik domestik umumnya berhubungan dengan kredibilitas pemimpin yang kerap menjalankan berbagai kebijakan dan tindakan yang otoriter atau dapat juga akibat pembagian prosentase atau perlakuan yang dianggap tidak adil. Konsep ini ternyata berlaku bagi terjadinya krisis sosial-politik di Suriah tahun 2011. Salah satu permasalahan yang mengiringi konflik Suriah tahun 2011 adalah munculnya krisis kemanusiaan, antara lain munculnya kelompok pengungsi yang didominasi oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Inilah yang kemudian mendorong *Human Right Watch* (HRW) untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Suriah. Peran *Human Right Watch* di Suriah diwujudkan dengan membangun forum koordinasi bersama yang dijalankan oleh *Human Right Watch* ternyata tidak lepas dari upaya organisasi ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah. Upaya ini ternyata berhasil memberikan kontribusi dalam mendukung penanganan krisis. Kemudian peran selanjutnya diwujudkan melalui penyusunan dan perumusan agenda bersama yang merupakan bagian dari peran *Human Right Watch* untuk menerapkan perlindungan masyarakat sipil dan hukum humaniter internasional. Tujuan akhir dari peran ini adalah terlindunginya masyarakat sipil dari pihak-pihak yang bersengketa, baik kubu pro-pemerintahan ataupun oposisi.